

**ANALISIS ARAH PERKEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 1995-2000**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

AGUS SUSANTO

No. Mhs. : 94213091

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2003**

**ANALISIS ARAH PERKEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 1995-2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh :

Agus Susanto

No. Mahasiswa : 94213091

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA

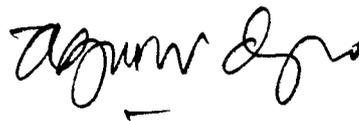
2003

ANALISIS ARAH PERKEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 1995-2000

Yogyakarta,

Telah disetujui oleh,

Dosen Pembimbing



Drs. Agus Widarjono, MA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL :

ANALISIS ARAH PERKEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 1995-2000

Disusun Oleh : Agus Susanto

Nomor Mahasiswa : 94213091

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada tanggal 24 September 2003

Pembimbing Skripsi : Drs. Agus Widarjono, MA

Penguji I : Drs. Unggul Priyadi, M.Si

Penguji II : Drs. Sahabudin Sidiq, MA

(*Agus Widarjono*)
(*Unggul Priyadi*)
(*Sahabudin Sidiq*)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



[Signature]
Suwarsono, MA

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Diantara ketertiban yang paling besar ialah
 - Terus menerus berbuat dosa sambil mengharapkan ampunan tetapi tanpa penyesalan.
 - Mengharapkan untuk bisa dekat dengan Allah tanpa diingini ketaatan kepada Nya.
 - Menanam benih neraka tetapi mengharapkan panen surga.
 - Ingin tinggal bersama orang-orang yang taat tapi dengan cara yang maksiat.
 - Menunggu-nunggu pahala tanpa berbuat amal.

- ❖ Kesempurnaan hamba tergantung pada dua kekuatan, yaitu ilmu dan cinta. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu tentang Allah, dan cinta paling tinggi adalah cinta kepada-Nya, sedangkan kesenangan yang paling sempurna tergantung dua hal ini.

Kupersembahkan karya ini untuk

- Bapak/Ibu yang telah memberi do'a dan cinta terbaiknya untukku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “ANALISIS ARAH PERKEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 1995-2000”.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini bukan hanya semata-mata jerih payah penulis saja, tetapi juga bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA Selaku Ketua Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dan selaku pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu guna memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis .
3. Bapak Drs. Suharto, M.Si Selaku pembimbing Akademik.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan dan membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak/Ibu Pegawai Referensi dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak/Ibu Pegawai Badan Pusat Statistik Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah.
7. Bapak / Ibu Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberi bimbingan, do'a, kasih sayang, dorongannya sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.
9. Semua teman-teman kuliah dan temen-temen yang lain yang ikut membantu, menemani dan memberikan dorongan kepada penulis.

Semoga segala bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara, mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini mengandung banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka oleh karena itu semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, September 2003

Penulis

Agus Susanto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi	iv
Halaman Motto dan Pesembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Organisasi Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	13
2.1 Keadaan Penduduk	13
2.2 Keadaan Penduduk Menurut tingkat Pendidikan ...	18
2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian	23
BAB III KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	27
3.1 Pertumbuhan Ekonomi	27

3.2	Teori Basis Ekonomi dan Perdagangan	29
3.3	Pembangunan Ekonomi	33
3.4	Perencanaan Pembangunan	35
3.4.1	Pengertian Perencanaan	35
3.4.2	Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan	37
3.4.3	Fungsi Perencanaan Pembangunan	38
3.4.4	Proses Perencanaan Pembangunan	39
3.4.5	Unsur-unsur Pokok Perencanaan Pembangunan	40
3.4.6	Macam-macam Perencanaan Pembangunan	41
3.5	Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah	48
3.5.1	Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah	49
3.5.2	Implikasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	49
3.6	Landasan Teori	50
3.6.1	Analisis Shift-Share Klasik	51
3.6.2	Analisis Location Quotien (LQ)	55
BAB IV	METODOLOGI PENELITIAN	57
4.1	Lokasi Penelitian	57
4.2	Jenis Data dan Sumber Data	57
4.3	Definisi Variabel	58
4.4	Metode Analisis	58

BAB	V	DATA DAN ANALISIS DANA.....	62
		5.1 Deskripsi Data	62
		5.2 Hasil Analisis Shift-Share	63
		5.3 Hasil Analisis LQ	79
		5.3.1 LQ Kabupaten Sukoharjo dan Karesidenan Surakarta	79
		5.3.2 LQ Kabupaten Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah	83
BAB	VI	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	90
		6.1 Kesimpulan	90
		6.2 Implikasi	92
		Daftar Pustaka	94

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto dan Laju Pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995 – 2000.
- Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995 – 2000.
- Tabel 3.1 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Sukoharjo Akhir Tahun 2000.
- Tabel 3.2 Banyaknya Penduduk dan Prosentase Pertumbuhan di Kabupaten Sukoharjo Akhir Tahun 1991 – 2000.
- Tabel 3.3 Banyaknya Penduduk setiap Km² menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Akhir Tahun 2000.
- Tabel 3.4 Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja Menurut Pendidikan, Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo.
- Tabel 3.5 Penduduk usia 10 tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Sukoharjo.
- Tabel 3.6 Ratio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001.
- Tabel 3.7 Ratio Murid Terhadap Guru Sekolah Lanjutan Pertama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001.
- Tabel 3.8 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Harga Konstan dan Harga berlaku Tahun 1995 - 1999.
- Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995 – 1999 (%).

- Tabel 3.10 Kontribusi tiap-tiap Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1995-1999).
- Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Analisis Shift – Share Kabupaten Sukoharjo << Se-Karesidenan Surakarta.
- Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Analisis Shift – Share Kabupaten Sukoharjo << Propinsi Jawa Tengah.
- Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Analisis Location Quotien (LQ) Kabupaten Sukoharjo dan Karesidenan Surakarta.
- Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Analisis Location Quotien (LQ) Kabupaten Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah.

DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 1995 – 2000 (Dalam Jutaan Rupiah)
- Tabel 2 Produk domestik regional bruto menurut Lapangan usaha atas dasar harga konstan Se-kaesidenan surakarta 1995 – 2000
- Tabel 3 Produk domestik regional bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Propinsi Jawa Tengah Tahun 1995 – 2000

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dikeluarkannya Undang – Undang No. 22 / 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 25 / 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diharapkan mampu membawa nuansa dan paradigma baru, dimana Undang – Undang ini mampu memberikan warna yang jelas dan lebih menekankan pada prinsip – prinsip demokrasi, peran – peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Secara teoritis otonomi daerah atau desentralisasi diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat (Imamudin Yuliadi, 2001, Hal. 217) yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada.
2. Memperbaiki alokasi sumberdaya ekonomi melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lebih lengkap.

Melalui kebijaksanaan otonomi daerah ini, peran pemerintah daerah menjadi semakin signifikan, di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan dan ketetapan menurut prakarsa maupun aspirasi masyarakat

setempat, pemerintah daerah juga dituntut secara kreatif untuk dapat menawarkan dan menggali potensi dan kekayaan daerahnya. Harapan dari seluruh masyarakat Indonesia adalah apapun bentuk dan keputusan yang diambil dari kebijakan otonomi daerah agar dapat menggerakkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang dapat dilihat dari hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui perhitungan PDRB dapat diketahui pertumbuhan masing - masing sektor ekonomi, kontribusi masing – masing sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB, dan struktur perekonomian daerah (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2000, Hal 19).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat seringkali digambarkan dalam berbagai tingkat kemajuan ekonomi. Perkembangan ekonomi regional merupakan gambaran awal untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Walaupun hal tersebut tidak seluruhnya benar, namun memang ada keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara perkembangan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya .

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo perlu terus dipantau dan diukur sampai sejauh mana sektor-sektor ekonomi telah berjalan , terutama dalam kondisi ekonomi yang masih mengalami krisis

yang berkepanjangan. Dengan beberapa indikator ekonomi akan diketahui perkembangan beberapa kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tidak lepas dari peran aktif setiap sektor ekonomi yang merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah.

Setiap propinsi hendaknya mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing dan juga peran pemerintah harus mampu mendukung pembangunan di tiap - tiap daerah sehingga tujuan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto dan Laju Pertumbuhan
Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 1995-2000

Tahun	Produk Domestik Bruto (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan (Persen)
1995	39.013.952,64	-
1996	41.862.203,72	7,30
1997	43.129.838,90	3,03
1998	38.065.273,35	-11,74
1999	39.394.513,74	3,49
2000	40.932.538,43	3,90

Sumber: *Pendapatan domestik regional bruto*, BPS Kab. Sukoharjo.

Pada tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Pada tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah dari tahun 1995-2000 cenderung mengalami penurunan, yakni pada tahun 1995 jumlah Produk Domestik Regional Bruto baru sebesar 46.586.032,91 juta rupiah. Selanjutnya menurun tiga tahun kemudian tepat pada tahun 1998 jumlah Produk Domestik Regional Bruto sebesar 38.065.273,35 juta rupiah, tetapi pada tahun 1999 dan tahun 2000 perekonomian Propinsi Jawa Tengah Indonesia mulai mengalami peningkatan, krisis moneter yang berlarut-larut telah menimbulkan laju pertumbuhan perekonomian yang negatif. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada tahun 1998 sebesar : -11,74 persen. Dari tabel di atas kita harus kembali menginstropeksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Tabel 1.2
Produk Domestik Bruto dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 1995-2000

Tahun	Produk Domestik Bruto (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan (Persen)
1995	990.382,98	-
1996	1.163.570,12	17,49
1997	1.195.897,01	2,79
1998	1.061.616,80	-11,23
1999	1.074.923,61	1,25
2000	1.112.790,61	3,52

Sumber: *Pendapatan domestik regional bruto*, BPS Kab. Sukoharjo.

Pada tabel 1.2 adalah gambaran Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1995-2000, dimana terlihat adanya kemajuan yang cukup berarti, namun pada tahun 1998 jumlah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo merosot tajam dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1997. Krisis moneter yang melanda perekonomian nasional sejak pertengahan 1998 yang lalu, ternyata dampaknya sangat terasa hampir di semua sektor ekonomi. Tetapi pada tahun 1999 mulai terlihat adanya peningkatan hingga tahun 2000 yaitu sebesar 1,25 persen pada tahun 1999 menjadi 3,52 persen pada tahun 2000.

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor
Tahun 1995-2000 (Jutaan Rupiah)

SEKTOR	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	287.828,07	294.407,85	280.484,45	265.468,19	240.957,15	236.742,52
2. Pertambangan dan Pengalihan	14.458,62	17.304,24	18935,74	14.707,35	15.712,82	16.320,91
3. Industri Pengolahan	236.651,15	349.732,65	363.562,14	271.468,83	281.042,26	291.693,76
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	8.226,63	9.546,41	12676,35	10.353,31	11.645,35	13.052,99
5. Bangunan	45.400,81	47.481,50	50.430,74	35.092,91	39.317,10	44.039,08
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	187.952,69	223.024,19	240.125,47	241.968,50	252.446,70	270.015,09
7. Pengangkutan dan Komunikasi	30.442,55	33.300,05	37.072,94	34.339,42	38.181,19	40.172,31
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	47.407,98	51.087,33	51.389,48	47.057,35	48.258,38	51.122,50
9. Jasa-Jasa	132.014,48	137.685,90	141.219,70	141.160,94	147.353,66	149.631,45
Total PDRB	990.382,98	1.163570,12	1.195.897,01	1.061.616,80	1.074.923,61	1.112.790,61

Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto, Kabupaten Sukoharjo BPS, berbagai edisi.

Sektor pertanian merupakan satu-satunya lapangan usaha yang mengalami perkembangan yang menurun pada tahun 2000. Sektor pertanian mengalami laju pertumbuhan negatif, yaitu sebesar $-1,75\%$. Ini berarti bahwa sektor pertanian selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan turunya produksi panen pada beberapa komoditi pertanian, terutama yang tergabung dalam sub sektor tanaman bahan makanan dan kehutanan, dengan besarnya penurunan masing-masing sebesar : $-9,90\%$ dan $-6,35\%$.

Laju pertumbuhan yang paling besar pertumbuhannya dialami oleh sektor bangunan, listrik dan air bersih masing-masing sebesar: $12,01\%$, dan $12,00\%$. Tampaknya kedua sektor ini merupakan sektor yang paling cepat melakukan perubahan ekonomi. Pada sektor bangunan menunjukkan indikasi bahwa kebutuhan perumahan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2000 semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan dibangunnya kembali proyek-proyek perumahan di beberapa lokasi perumahan yang pada dua tahun sebelumnya sempat terjadi kemacetan. Ini juga ditunjang dengan dibukanya kembali kredit perumahan oleh beberapa bank yang sempat tidak dikucurkan dalam tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya perumahan-perumahan baru tersebut secara otomatis akan meningkatkan permintaan kebutuhan listrik dan air bersih.

Sektor industri pengolahan yang menjadi andalan utama di Kabupaten Sukoharjo juga mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar : $3,79\%$. Peningkatan ini hampir sebanding dengan peningkatan

sebelumnya yang tercatat sebesar: 3,35%. Laju pertumbuhan tersebut diakibatkan pada peningkatan produksi pada beberapa industri pengolahan, terutama industri ekspor dan industri kecil dan rumah tangga yang mulai kembali mendapat pesanan, khususnya industri yang menghasilkan komoditi untuk bangunan.

Dengan melakukan penelitian terhadap struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo, maka akan diketahui pergeseran pada sektor-sektor ekonomi serta sektor-sektor yang merupakan sektor potensial atau sektor andalan di daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat memprioritaskan perencanaan pembangunannya terhadap sektor-sektor potensial atau sektor andalan dalam struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo, yang nantinya tetap menjadi sektor yang paling besar kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan akhir dari pemantauan terhadap pergeseran dalam struktur perekonomian daerah adalah naiknya pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berarti pula menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pergeseran-pergeseran atau perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Sukoharjo dan sektor-sektor potensial dalam perekonomian Kabupaten Sukoharjo tahun 1995-2000.

Masalah utama di dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo adalah bagaimana pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi perencanaan yang matang serta kejelian pemerintah daerah dalam mengamati pergeseran-pergeseran dalam sektor ekonomi, pertumbuhan sektor ekonomi, serta dalam mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam perekonomian daerahnya. Disinilah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan di daerah agar dapat berjalan sesuai dengan prioritas yang diinginkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS ARAH PERKEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 1995-2000”.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sukoharjo selama tahun 1995-2000.
2. Bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 1995-2000 dibandingkan sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah berdasarkan analisis Shift-Share (S-S).
3. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor potensial atau sektor andalan Kabupaten Sukoharjo tahun 1995-2000 dalam struktur perekonomian berdasarkan analisis Location Quotient (LQ).

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis perubahan struktur sektor-sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 1995-2000 dibandingkan dengan sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah dan Karesidenan Surakarta.
2. Untuk mengkaji pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 1995-2000 dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah dan Karesidenan Surakarta berdasarkan analisis Shift-Share (S-S).
3. Untuk mengkaji sektor ekonomi potensial (sektor basis) dalam struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo tahun 1995-2000 sebagai dasar evaluasi bagi pengembangan sektor tersebut di tahun-tahun mendatang berdasarkan analisis Location Quotient (LQ).

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini merupakan aplikasi langsung dari salah satu alat analisis ekonomi yang didapat di bangku kuliah dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Membantu memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan terhadap penelitian yang pernah dilakukan.
2. Memberikan masukan bagi lembaga yang terkait dengan masalah ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo

1.5. ORGANISASI PENULISAN

Organisasi penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam enam bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi:

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN, meliputi:

Gambaran umum tentang letak geografis, keadaan penduduk, anggaran pembangunan, dan penerimaan daerah, beberapa tujuan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, dan lain-lain

BAB III. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI, meliputi:

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya serta tulisan-tulisan atau jurnal yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti dan landasan teori yang berkaitan dengan tulisan, latar belakang tulisan, latar belakang rumus.

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN, meliputi:

Lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, definisi variabel, metode analisis.

BAB V. DATA DAN ANALISIS DATA, meliputi:

Data-data yang diperlukan untuk perhitungan, hasil perhitungan analisis Shift Share dan Location Quotien serta penjelasan-penjelasan dari hasil perhitungan yang dilakukan.

BAB VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI, meliputi

Kesimpulan yang didapat dari hasil perhitungan serta implikasi yang sesuai dengan permasalahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Untuk memahami karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Dati II Sukoharjo, perlu adanya deskripsi atau gambaran umum tentang Kabupaten Sukoharjo dipandang dari berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya uraian mengenai karakteristik penduduk ataupun masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ini, diharapkan akan lebih mudah memahami tingkah laku dan aktifitas yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun motto dari Kabupaten Sukoharjo adalah Sukoharjo Makmur, yang berarti bahwa masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sangat mendambakan suatu daerah yang memiliki unsur-unsur Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul dan Rapi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan selengkapnya mengenai aspek demi aspek sebagai berikut

2.1. Keadaan Penduduk

Data tentang keadaan penduduk merupakan faktor penting yang dapat digunakan untuk memahami permasalahan yang ada pada suatu wilayah tertentu, sehingga hal ini akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyusun perangkat administratif dan kebijakan dalam mengantisipasi ataupun menyelesaikan setiap permasalahan.

(1) Keadaan Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio

Keadaan penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun 2000 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan berjumlah 401.395 jiwa, sementara jumlah penduduk laki-

laki hanya 386.931 jiwa, sehingga jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Sukoharjo Akhir Tahun 2000

Kecamatan	Penduduk		Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	
1. Weru	31.711	33.018	960
2. Buku	25.103	25.906	969
3. Tawang Sari	28.080	28.596	982
4. Sukoharjo	37.947	38.870	976
5. Nguter	32.003	32.213	993
6. Bendosari	30.716	31.415	978
7. Polokarto	34.993	35.590	983
8. Mojolaban	35.642	36.412	979
9. Grogol	44.289	48.478	914
10. Baki	24.043	24.759	971
11. Gatak	22.020	22.778	967
12. Kartasura	40.384	43.360	931

Sumber : Sukoharjo dalam angka 2000

Dari tabel 3.1. tersebut dapat diketahui tingkat sex ratio penduduk di Kabupaten Sukoharjo, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 1000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat sex ratio penduduk Kabupaten Sukoharjo adalah 964. Hal ini menunjukkan bahwa tiap seribu penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat sejumlah 964 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki.

(2) Keadaan Penduduk menurut Jumlah dan Laju Pertumbuhannya.

Pada tahun 1991, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo sebanyak 702.429 jiwa dan pada tahun 2000 berjumlah 788.326 jiwa

yang berarti selama sepuluh tahun terakhir ini jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo bertambah sebanyak 85.897 jiwa atau sebesar 0,61% dari tahun 1991. Untuk lebih mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2. Banyaknya Penduduk dan Prosentase Pertumbuhan di Kabupaten Sukoharjo Akhir Tahun 1991 – 2000

Kecamatan	Banyaknya Penduduk			Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1991	345.295	357.134	702.429	0,96
1992	348.568	360.225	708.793	0,91
1993	351.628	363.912	715.540	0,95
1994	356.481	368.313	724.794	1,29
1995	361.542	373.012	937.554	1,35
1996	367.893	379.408	747.301	1,74
1997	374.689	386.014	760.703	1,79
1998	378.821	390.100	768.421	1,01
1999	382.252	393.855	776.107	1,00
2000	386.931	401.395	788.326	1,57

Sumber : Sukoharjo dalam angka 2000

Daftar tabel 3.2. dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahunnya adalah 1.26% per tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar 1,79% dan terendah pada tahun 1992 yaitu sebesar 0,91%. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo sebesar 776.107 jiwa. Hal ini berarti dalam satu tahun terakhir yaitu tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup pesat yaitu sebesar 0,57%, mengingat pada dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1998 terjadi penurunan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sebesar 0,78% dan kondisi ini masih bisa bertahan pada tahun

1999. Namun pada tahun 2000 kondisi ini tidak dapat dipertahankan, sehingga terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 0,57% dari tahun-tahun sebelumnya.

(3) Keadaan Penduduk menurut Tingkat Kepadatan.

Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 466,66 Km² dan pada tahun 2000 dihuni oleh 788.326 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.689 jiwa per Km². Jika dilihat dari tingkatan kepadatannya, jumlah penduduk sebesar itu hampir menyebar secara merata di semua wilayah kecamatan, kecuali untuk Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura. Kecamatan Kartasura dengan luas 19,23 Km² harus menampung 83.744 jiwa yang berarti tingkat kepadatannya 4.355 jiwa per Km². Kemudian untuk wilayah Kecamatan Grogol dengan luas 30,00 Km² harus menampung 92.767 jiwa yang berarti tingkat kepadatannya 3.092 jiwa per Km². Keadaan tersebut dapat dimaklumi karena kedua wilayah kecamatan tersebut dekat dengan Kota Surakarta sebagai pusat perdagangan. Selain itu untuk Kecamatan Grogol merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Sukoharjo dengan Kota Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga sudah sewajarnya jika kedua wilayah tersebut memiliki tingkat kepadatan yang paling tinggi. Untuk wilayah yang paling jarang penduduknya adalah Kota Polokarto yang memiliki luas wilayah 62.14 Km² yang hanya menampung 83.744 jiwa yang berarti tingkat kepadatannya 1.135 jiwa per Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3. Banyaknya Penduduk Setiap Km² menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Akhir Tahun 2000

Kecamatan	Luas (Km ²)	Banyaknya penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Weru	41,98	64.729	1.542
2. Buku	43,86	54.009	1.163
3. Tawang Sari	39,98	56.676	1.418
4. Sukoharjo	44,58	76.817	1.723
5. Nguter	54,88	64.216	1.170
6. Bendosari	52,98	62.131	1.173
7. Polokarto	62,17	70.583	1.135
8. Mojolaban	35,54	72.054	2.027
9. Grogol	30,00	92.767	3.092
10. Baki	21,97	48.802	2.221
11. Gatak	19,47	44.798	2.301
12. Kartasura	19,23	83.744	4.355

Sumber : Sukoharjo dalam angka 2000

Tabel 3.3. Angkatan kerja yang tidak bekerja menurut pendidikan, jenis kelamin dan kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	SD	SMTP	SMU	Akademi /PT	Jumlah
1. Weru	590	594	641	250	2.075
2. Bulu	473	419	578	245	1.715
3. Tawang Sari	395	573	739	284	1.991
4. Sukoharjo	605	640	750	310	2.305
5. Nguter	543	542	685	267	2.037
6. Bendosari	554	515	626	253	1.948
7. Polokarto	679	775	587	142	2.183
8. Mojolaban	734	882	827	277	2.720
9. Grogol	781	711	804	323	2.619
10. Baki	478	614	599	199	1.890
11. Gatak	554	558	508	164	1.784
12. Kartasura	1.064	911	1.034	398	3.407
Jumlah	7.450	7.734	9.412	3.112	26.674

Sumber data : Disnaker Kabupaten Sukoharjo

Pada tabel 3.3. di atas nampak bahwa banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja menurut pendidikan dan jenis kelamin yang laing besar di Kecamatan Kartasura yaitu sebesar 3.407 jiwa sedangkan yang paling kecil di Kecamatan Bulu sebesar 1.715.

(4) Keadaan Penduduk menurut Lapangan Usaha

Jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang berusia 10 tahun keatas sebesar 451.473 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 24,77% atau 111.824 jiwa diantaranya bergantung hidup pada sektor perdagangan yang merupakan jumlah terbesar. Kemudian disusul dengan sektor industri yaitu sebesar 22.54% atau 101.770 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.4. Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Sukoharjo

Jenis Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pertanian	70.547	41.009	111.556
2. Pertambangan	800	570	1.390
3. Industri	53.434	48.336	101.770
4. Listik, Gas dan Air	1.786	570	2.356
5. Kontruksi	19.019	431	19.450
6. Perdagangan	48.685	63.139	111.824
7. Komunikasi	21.016	215	21.231
8. Keuangan	3.796	2.712	6.508
9. Jasa	44.110	30.683	74.793
10. Lainnya	595	0	595

Sumber : Sukoharjo dalam angka 2000

2.2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembangunan negara yang sedang berkembang. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas di harapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang profesional di bidangnya dan mampu untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

(1). Guru dan Murid Sekolah Dasar

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo terdapat sebanyak 489 sekolah dasar yang di susun menurut status dan kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun 2001, yaitu SD negri sebesar 486, SD inpres, SD swasta sebesar 12 dan SD subsidi yang terdapat di 12 Kecamatan. Banyaknya murid sekolah dasar yang bersekolah di SD negri dan SD Swasta adalah sebesar 71.139 siswa, di mana jumlah murid Laki-laki adalah sebanyak 36.687 siswa dan murid perempuan adalah sebanyak 34.452 siswa. Sedangkan jumlah guru yang mengajar adalah sebanyak 7.322 orang, yaitu SD Negri sebesar 7.223 orang guru dan SD swasta sebesar 109 orang guru.

Tabel 3.5. Ratio Murid terhadap Guru Sekolah Dasar
Menurut kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001.

Kecamatan	Murid	Guru	Ratio murid terhadap Guru
01. Weru	5231	408	13
02. Bulu	4575	289	16
03. Tawang Sari	5119	325	16
04. Sukoharjo	7837	457	17
05. Nguter	5068	334	15
06. Bendosari	4833	300	16
07. Polokarto	6781	361	19
08. Mojolaban	7256	389	19
09. Grogol	8754	470	19
10. Baki	4546	286	16
11. Gatak	4003	285	14
12. Kartasura	7136	428	17
Jumlah	71139	4332	16

Sumber : BPS, Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2001

Dari tabel diatas dapat di ketahui besarnya ratio murid terhadap guru sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo, dimana perbandingan jumlah murid dan guru yang mengajar di sekolah dasar adalah rata-rata 16 orang murid per guru.

(2). Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Pertama

Banyaknya Sekolah Lanjutan Pertama di Kabupaten Sukoharjo yaitu sekolah negeri sebanyak 43 sekolah dan swasta sebanyak 34 sekolah, dimana sekolah negeri memiliki jumlah murid sebesar 27.296 dsiswa dan jumlah guru yang mengajar adalah sebanyak 1.553 orang guru. Sekolah swasta memiliki jumlah murid sebanyak 7.289 siswa dengan jumlah pengajar sebanyak 699 orang guru. Jumlah Sekolah Lanjutan Pertama di Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan adalah sebanyak 77 buah sekolah, jumlah murid adalah sebanyak 34.585 orang siswa dan jumlah pengajar di Sekolah Lanjutan Pertama adalah sebanyak 2.252 oarang guru.

Tabel 3.6. Ratio Murid terhadap Guru Sekolah Lanjutan Pertama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001.

Kecamatan	Murid		Guru		Ratio murid thd.Guru	
	Umum	Kejuruan	Umum	Kejuruan	Umum	Kejuruan
01. Weru	2270	0	117	0	19	0
02. Bulu	1538	0	80	0	19	0
03. Tawang Sari	2364	0	140	0	17	0
04. Sukoharjo	6053	0	298	0	20	0
05. Nguter	2292	0	136	0	17	0
06. Bendosari	1369	0	77	0	18	0
07. Polokarto	2134	0	99	0	22	0
08. Mojolaban	2692	0	118	0	23	0
09. Grogol	1192	0	77	0	15	0
10. Baki	1500	0	95	0	16	0
11. Gatak	1604	0	95	0	17	0
12. Kartasura	2288	0	139	0	16	0
Jumlah	27296	0	1471	0	19	0

Sumber : BPS, Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2001

(3). Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Atas

Sekolah Lanjutan Atas di Kabupaten Sukoharjo meliputi sekolah negeri dan swasta, yang terdiri dari SMU, STM dan SMEA. Banyaknya murid yang bersekolah di SMU negeri adalah sebesar 5968 siswa dengan jumlah guru yang mengajar adalah sebanyak 405 orang dan banyaknya sekolah adalah sejumlah 9 buah. Di SMU swasta memiliki murid sebesar 2484 siswa dengan jumlah pengajar sebanyak 379 orang guru dan memiliki 15 buah sekolah. Jumlah murid yang bersekolah di STM adalah sebesar 6869 siswa dengan jumlah pengajar adalah sebesar 455 orang guru dan jumlah sekolah yang dimiliki adalah sebanyak 12 buah sekolah. Murid yang bersekolah di SMEA adalah sebanyak 4239 siswa dengan jumlah pengajar adalah sebanyak 321 orang guru dan memiliki sebanyak 11 buah sekolah.

(4). Mahasiswa

Kabupaten Sukoharjo memiliki dua buah Universitas yaitu Universitas Bangun Nusantara dan Universitas Muhamadiyah Surakarta. Universitas Bangun Nusantara memiliki sebanyak 4078 mahasiswa pada akhir tahun 2001 dengan jumlah lulusan sebanyak 558 mahasiswa, Universitas yang dulunya bernama IKIP Veteran Sukoharjo ini memiliki empat buah Fakultas yaitu : Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Universitas Muhamadiyah Surakarta memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 22835 mahasiswa dengan lulusan sebanyak 2759 mahasiswa pada akhir taun 2001. Fakultas yang dimiliki adalah sebanyak 10 buah, Program D-3 sebanyak 4 buah dan Program Magister sebanyak dua buah.

Fakultas yang ada meliputi :

- FKIP
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Teknik
- Fakultas Geografi
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Tarbiyah
- Fakultas Ushuludin
- Fakultas Syari'ah
- Fakultas Farmasi

Program D-3 meliputi :

- D-3 Keperawatan
- D-3 Fisioterapi
- D-3 Gizi
- D-3 Kesehatan Lingkungan

Program Magister meliputi :

- Magister Study Islam
- Magister Management

2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Strukur Perekonomian

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu dengan melihat laju pertumbuhan pendapatan daerah regional bruto (PDRB) daerah tersebut. Dari data PDRB inilah akan didapatkan perkembangan ekonomi setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 1999 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik, yaitu sebesar 1,25. Angka positif tersebut merupakan indikasi yang cukup baik, mengingat pada tahun sebelumnya laju pertumbuhan ekonomi sangat buruk yaitu sebesar -11,23%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo Berdasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 1995-1999.

Tahun	PDRB (Harga Konstan)		PDRB (Harga Berlaku)	
	Nilai (jutaan rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (jutaan rupiah)	Pertumbuhan (%)
1995	1.062.628,28	19,45	1.200.866,05	23,85
1996	1.163.570,12	09,50	1.381.262,68	15,02
1997	1.195.897,01	02,78	1.910.193,85	16,57
1998	1.061.616,80	-11,23	2.064.458,52	28,21
1999	1.074.923,61	1,25	2.257.628,69	09,36

Sumber : DPRD Kabupaten Sukoharjo 1999

Dari tabel 3.8 tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995-1997 untuk angka konstan masih menunjukkan nilai positif. Akan tetapi trend yang terjadi cenderung menurun, hal ini berarti laju pertumbuhan cenderung menurun sehingga pada tahun 1998 terjadi laju pertumbuhan yang negatif. Pada tahun 1999 laju pertumbuhan semakin menarik dan menunjukkan angka 1,25%. Hal ini berarti laju pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Kondisi ini sangat berbeda dengan yang terjadi

untuk angka yang berlaku. Justru pada tahun 1998 terjadi kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar 28,21% dan pada tahun 1999 cenderung menurun menjadi 09,36%. Hal tersebut terjadi, karena pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berakibat terjadinya kenaikan yang harga yang mencolok, khususnya harga barang konsumsi dan barang modal yang sangat berdampak pada merosotnya nilai pertumbuhan PDRB yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukoharjo tetapi di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut lapangan usaha pada tahun 1999 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-1999 (%)

Lapangan Usaha	Tahun				
	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	1,01	2,29	-4,73	-5,35	-9,23
2. Pertambangan & Penggalian	10,75	19,68	9,43	-22,33	6,84
3. Industri Pengolahan	63,21	18,62	3,95	-25,33	3,53
4. Listrik, Gas & Air Bersih	16,12	16,04	32,79	-18,33	12,57
5. Bangunan	6,30	4,58	6,21	-30,41	12,04
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,67	10,40	7,67	0,77	4,33
7. Pengangkutan dan Komunikasi	14,92	9,39	11,33	-7,37	11,19
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	9,32	7,76	0,59	-8,43	2,55
9. Jasa-jasa	5,42	4,30	2,57	-0,04	4,39
PDRB	19,45	9,50	2,78	-11,78	1,25

Sumber : PDRB Kabupaten Sukoharjo 1999

Dari tabel 3.9 tersebut dapat dilihat bahwa secara sektoral hampir semua sektor mengalami laju pertumbuhan yang positif, kecuali untuk sektor pertanian. Sektor ini pada tahun 1999 menunjukkan laju pertumbuhan sebesar

-9,23%. Kegagalan panen pada komoditi pertanian ini, menyebabkan menurunnya produksi di sektor pertanian. Sedangkan pertumbuhan terbesar dialami sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 12,57% diikuti sektor bangunan sebesar 12,04% dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,19%.

Perkembangan yang terjadi pada tahun 1999 di Kabupaten Sukoharjo juga membawa sedikit pengaruh pada struktur perekonomian. Akibatnya, menurunnya laju pertumbuhan sektor pertanian menyebabkan pola distribusi sedikit berubah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10 Kontribusi Tiap-tiap Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sukoharjo (Berdasar Harga Konstan 1995-1999)

No	Lapangan Usaha	Nilai (Jutaan Rupiah)	Kontribusi (%)
1.	Pertanian	240.957	22,42
2.	Pertambangan & Penggalian	15.712,82	1,46
3.	Industri Pengolahan	281.042,26	26,15
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	11,654,35	1,08
5.	Bangunan	39,317,10	3,66
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	252.446,70	23,49
7.	Pengakuan dan Komunikasi	38.181,19	3,55
8.	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	48.258,38	4,49
9.	Lain-lain	147.353,66	13,71

Sumber : PDRB Kabupaten Sukoharjo 1999

Dari tabel 3.10 tersebut dapat dilihat sektor industri pengolahan pada tahun 1999 ini menduduki posisi pertama yaitu sebesar Rp. 281.042,26 juta atau sebesar 26,15%. Untuk sektor perdagangan menduduki posisi kedua yaitu sebesar Rp. 252.466.70 juta atau sebesar

23,49%. Sedangkan sektor pertanian bergeser pada posisi ketiga yaitu sebesar Rp. 240.957,15 juta atau sebesar 22,42%.

Akan tetapi perubahan ini belum dikatakan perubahan yang cukup signifikan bahwa telah terjadi pergeseran pola ekonomi dari perekonomian agraris menjadi perdagangan. Hal ini lebih diakibatkan pada kegagalan produksi pertanian daripada lonjakan pertumbuhan sektor pertanian positif, tampaknya sektor perdagangan belum mampu menggeser sektor pertanian. Namun demikian sektor perdagangan juga merupakan salah satu faktor yang dapat diharapkan peranannya pada masa yang akan datang, mengingat pada sektor ini masih banyak potensi yang belum dikembangkan secara optimal.

Dengan berkurangnya peran yang diberikan sektor pertanian, maka hal ini akan menjadikan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Sukoharjo semakin diandalkan. Hal ini terbukti bahwa sektor industri pengolahan memang cukup potensial untuk lebih dikembangkan lagi.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dua definisi tentang pengertian atau konsep pertumbuhan ekonomi (Faried Wijaya, 1992, Hal. 264) adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang jika terjadi pertumbuhan output riil.
2. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan kenaikan output riil per orang. Karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi bila tingkat kenaikan output riil total lebih besar dari pada penambahan penduduk, dan sebaliknya terjadi penurunan taraf hidup aktual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat dari pada laju pertumbuhan output riil total.

Seperti diketahui hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa dalam proses produksi bila paling sedikit satu faktor produksi dipegang konstan sebagai faktor tetap sedangkan faktor yang lainnya terus ditambah secara berurutan, maka produk total akan terus bertambah tetapi lewat titik tertentu tambahan produk (produk marjinal) menurun.

Faried Wijaya (1992, Hal. 275) mengemukakan, indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan produk marjinal tenaga kerja, jumlah tenaga kerja (atau jumlah penduduk) dimana pendapatan riil perkapita mencapai maksimum disebut sebagai jumlah penduduk optimum.

Ini merupakan jumlah penduduk yang memberikan pendapatan perkapita maksimum dengan menggunakan sejumlah tertentu sumber-sumber dan teknologi. Jadi bisa dikatakan apakah jumlah penduduk yang ada terlalu banyak, terlalu sedikit, atau sudah mencapai optimal.

Pertambahan penduduk berarti penambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata, serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang.

Dengan mendasarkan pada penyederhanaan situasi tersebut di atas maka dapat dikatakan penyebab rendahnya pendapatan di negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan-kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa penambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan teknologi (Faried Wijaya, 199, Hal.277)

Hal esensial yang harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu, pertama sumber-sumber yang ada harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tidak boleh ada sumber-sumber yang menganggur dan alokasi penggunaannya yang kurang efisien. Kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi (kuantitas dan kualitas sumber daya alam, ketrampilan tenaga kerja, kapital, dan kemajuan teknologi) harus diusahakan pertambahannya.

Bertambahnya kuantitas serta kualitas sumber-sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah dan sumber daya manusia, peralatan kapital, serta kemajuan teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Faried Wijaya, 1992, Hal. 299).

Hubungan ekonomi internasional, terutama dengan negara-negara maju dan berkembang dapat membantu memacu proses pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Hubungan ini berupa perluasan volume perdagangan, aliran penanaman kapital swasta, dan bantuan luar negeri baik berupa hadiah ataupun pinjaman. Jelas perdagangan bebas internasional berdasarkan prinsip spesialisasi keunggulan komparatif akan menaikkan kesejahteraan dunia, memperluas pasar, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. (Hal. 321).

3.2. Teori Basis Ekonomi dan Perdagangan

Esensi perdagangan adalah mengadakan spesialisasi antar lokasi dan kemudian mengadakan pertukaran (ekspor-impor), maka perdagangan dilakukan dengan melakukan spesialisasi dengan menghasilkan produk

dimana mereka masing-masing mempunyai keunggulan komparatif (Faried Wijaya, 1992, Hal. 362).

Perdagangan antar daerah/negara yang terjadi, merupakan cara dengan mana daerah/negara dapat mengadakan spesialisasi produksi barang-barang dan jasa-jasa tertentu berdasar keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing. Hal ini selanjutnya akan menaikkan produktifitas sumber-sumber yang dimiliki, hingga dapat diperoleh output total lebih banyak.

Spesialisasi perorangan atau spesialisasi antar daerah menghasilkan alokasi penggunaan sumber-sumber secara lebih efisien (Faried Wijaya, 1992, Hal. 365) hal ini karena :

1. Distribusi pemilikan berbagai sumber ekonomi antar lokasi (negara) misalnya sumber-sumber alam, tenaga kerja, serta peralatan produksi kapital buatan manusia berbeda dan tidak sama.
2. Produksi barang-barang dan jasa-jasa secara efisien memerlukan berbagai teknologi maupun kombinasi sumber-sumber berbeda.

Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah *basis* dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas-aktivitas lain (*non-basis*) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut (Hoover, 1984) seperti dikutip Supono (2001, Hal. 42).

Teori/model basis ekonomi tertanam dalam gagasan bahwa perekonomian lokal harus menambah aliran uang masuknya agar tumbuh

dan satu-satunya cara yang efektif untuk menambah aliran uang masuk adalah menambah ekspor (Supono, 2001, Hal. 42) mengutip (Blair, 1991; Hoover, 1984).

Studi basis ekonomi regional umumnya berupaya untuk menemukan aktivitas-aktivitas ekspor wilayah, untuk meramalkan pertumbuhan di aktivitas-aktivitas tersebut dan untuk mengevaluasi dampak dari kenaikan aktivitas ekspor terhadap aktivitas-aktivitas yang lain (Prasetyo Supono, 2001, Hal. 42).

Penjelasan dari dampak aktivitas ekspor atas aktivitas-aktivitas yang lain adalah bahwa aktivitas ekspor menghasilkan uang/pendapatan, dimana sebagian digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi, baik lokal maupun impor. Sebagian pendapatan yang lain, yang dihasilkan sektor ekspor/basis, dibelanjakan secara lokal oleh para pekerja sektor ekspor/basis tersebut, sehingga menciptakan pekerjaan-pekerjaan lokal baru. Pekerja-pekerja perekonomian sektor lokal pada gilirannya membelanjakan pendapatan mereka pada sektor lokal pula, sehingga menciptakan pekerjaan-pekerjaan lokal tambahan. Dengan demikian pendapatan yang semula diterima sektor ekspor/basis, dibelanjakan dan dibelanjakan lagi di daerah setempat atau sektor lokal. Hal ini secara lebih ringkas dapat dijelaskan bahwa aktivitas ekspor/basis menimbulkan tambahan pendapatan atau pertumbuhan sektor non basis karena adanya multiplier (pengganda) dalam perekonomian.

Harry W Richardson juga menyatakan hal senada, bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya-sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menciptakan kelayakan daerah dan menciptakan peluang kerja (Suyatno, 2000, Hal. 146).

Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Dasar pemikiran penggunaan teknik ini adalah teori *economic base* yang intinya adalah karena sektor ekonomi basis itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah sendiri maupun luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil keluar daerah ini menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya dapat menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru, kenaikan pendapatan di daerah itu akan menaikkan permintaan terhadap sektor non-basis atau industri lokal daerah tersebut.

Kunci dari teori berbasis ekonomi itu adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh atau tidak tumbuhnya suatu wilayah dan cepat tidaknya wilayah itu tumbuh ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu sebagai eksportir ke daerah lain dan atau ke luar negeri

(Bendavid-Val, 1991) sebagaimana dikutip Prasetyo Supono (2001, Hal. 43).

Prasetyo Supono (2001, Hal. 41) mengemukakan bahwa, selain menawarkan teknik-teknik pengukuran basis, sumbangan teori basis ekspor terhadap perkembangan alat-alat analisis regional adalah :

1. Merintis penggunaan multiplier (pengganda) untuk mengukur pengaruh ekspor terhadap variabel regional seperti employment (kesempatan kerja), pendapatan regional, output regional, nilai tambah regional, dan sebagainya.
2. Merintis penerapan model ekonomi makro pada tingkat regional melalui model penentuan pendapatan daerah.
3. Menyumbang sisi permintaan sebagai salah satu penentu pertumbuhan / perkembangan regional.

3.3. Pembangunan Ekonomi

Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya.

Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan

taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang (Lincoln Arsyad, 1992, Hal. 14).

Dari definisi diatas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus.
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita yaitu : Tingkat pertambahan GDP / GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk atau perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.
3. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, atau dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Karena itu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapat dan kesejahteraan,

meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, meningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan.

3.4. Perencanaan Pembangunan

3.4.1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia.

Pengertian yang lain, Perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama periode tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Linkolin Arsyad, 1992, Hal. 76).

Menurut Arthur Lewis dalam bukunya yang berjudul *Development Planning* membagi perencanaan dalam 6 pengertian seperti yang dikutip Lincolin Arsyad (1992) yaitu :

1. Perencanaan dihubungkan dengan letak geografis, bangunan tempat tinggal, bioskop dan sebagainya. Kadangkala ini disebut dengan perencanaan kota dan negara.

2. Perencanaan mempunyai arti memutuskan menggunakan dana pemerintah dimasa yang akan datang, jika pemerintah memiliki dana untuk dibelanjakan.
3. Ekonomi berencana adalah ekonomi dimana masing-masing satuan produksi (atau perusahaan) hanya memakai sumber manusia, bahan dan peralatan yang dialokasikan kesana melalui kuota dan menjual produknya semata-mata kepada orang atau perusahaan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat.
4. Perencanaan kadangkala berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah, apakah itu untuk perusahaan negara atau perusahaan swasta. Sebagian besar pemerintah menerapkan jenis perencanaan walau hanya untuk satu atau dua industri atau jasa saja yang dianggap penting.
5. Perencanaan adalah penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua buruh, devisa, bahan mentah dan sumber lainnya negara diberbagai bidang ekonomi.
6. Perencanaan dipakai untuk menggambarkan sarana yang dipergunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada perusahaan swasta.
7. Perencanaan dipakai untuk menggambarkan sarana yang dipergunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada perusahaan swasta.

Y. Dror sebagaimana dikutip dikutip Kunarjo (1993, Hal. 7) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsur-unsur :

1. Berhubungan dengan hari depan.
2. Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis.
3. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Belum ada kata sepakat diantara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah perencanaan ekonomi, namun demikian walaupun tidak ada kesepakatan pendapat diantara para ahli ekonomi, mereka tetap sependapat bahwa perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu yang tertentu pula.

3.4.2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu (Lincoln Arsyad, 1992, Hal. 74).

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan :

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (Steady Social Economic Growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.

2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha dipersifikasi ekonomi.
4. Usaha perluasan kesempatan kerja.
5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distribusi justic.
6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.

3.4.3. Fungsi Perencanaan Pembangunan

Sebagai alat untuk mencapai sasaran yang lebih baik, fungsi-fungsi perencanaan (Lincoln Arsyad, 1992, Hal. 75) adalah sebagai berikut :

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi dimasa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.

5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

3.4.4. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan sebenarnya mempunyai pentahapan yang panjang, apabila dirinci maka pentahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Kunarjo, 1993, Hal. 20) :

1. Melakukan penelitian tentang potensi sumberdaya alam dan manusia serta kelembagaan yang tersedia pada saat akan dimulai perencanaan.
2. Menentukan tujuan dan sasaran perencanaan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat.
3. Menterjemahkan tujuan dan sasaran-sasaran kedalam program-program dan kebijaksanaan di tingkat makro.
4. Menyusun kebijaksanaan secara lebih rinci mengenai apa dan siapa yang melaksanakan serta kapan.
5. Melaksanakan apa yang telah direncanakan.
6. Melakukan penilaian terhadap program-program dan kebijaksanaan yang sedang berjalan.
7. Apabila diperlukan, dilakukan revisi dan penyesuaian sesuai dengan perencanaan program yang benar.
8. Mengidentifikasi dan menginformasikan baik keberhasilan maupun kegagalan yang dapat dipergunakan sebagai baahn untuk perencanaan berikutnya.

Tahap-tahap di atas sebenarnya dapat diperas menjadi :
Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, Evaluasi.

Tahap-tahap tersebut apabila tidak dikoordinasikan, maka akan terjadi kelemahan dalam informasi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan rencana yang akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu ke delapan tahap tersebut merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

3.4.5. Unsur-unsur Pokok Perencanaan Pembangunan

Setiap perencanaan pembangunan mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut (Lincoln Arsyad, 1992, Hal. 74) :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
2. Adanya kerangka rencana makro.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
4. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan fiskal, pengangguran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya.
5. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral.
6. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

3.4.6. Macam-macam Perencanaan Pembangunan

3.4.6.1. Berdasarkan waktu

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) :

(1) *Perencanaan jangka panjang (Perspektif)*

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Dalam Perencanaan jangka panjang ini sarasannya belum bisa disajikan secara kuantitatif, tetapi biasanya hanya dicerminkan dengan sasaran yang kualitatif yaitu merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan ditempuh. Hal ini wajar mengingat dalam kurun waktu yang panjang, faktor-faktor eksternal sulit untuk diperhitungkan, sehingga sasaran-sasaran secara kuantitatif belum dapat disajikan.

Mahalanobis (1995) seperti dikutip Lincoln Arsyad (1993) mengamati bahwa perencanaan perspektif merupakan proses berkesinambungan dan mempunyai dua aspek pokok. Salah satu aspeknya adalah : perencanaan yang sedang berjalan diarahkan pada proyek-proyek yang dicantumkan dalam rencana jangka pendek (tahunan) di dalam kerangka rencana jangka menengah (lima tahunan). Rencana-rencana jangka menengah berikutnya itu sendiri harus disesuaikan dengan kerangka perencanaan

perspektif yang lebih luas dengan tenggang waktu yang panjang sekitar 10-25 tahun, atau bahkan lebih.

Tujuan pokok rencana perspektif adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka menengah dan jangka pendek, sehingga masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka menengah dan jangka pendek (Lincoln Arsyad, 1993).

(2) *Perencanaan Jangka Menengah*

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini walaupun masih umum, sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan secara kuantitatif.

(3) *Perencanaan Jangka Pendek*

Perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Karena jangka waktu yang pendek maka sasaran-sasaran dapat disajikan secara lebih kongkrit. Dilihat dari sudut penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Bintoro Tjokroamojojo (1980) seperti dikutip Kunarjo (1993, Hal. 11) menyebutkan bahwa perencanaan operasional tahunan ini merupakan modifikasi dari cara *rolling plans*. *Rolling plans* adalah perencanaan yang pada akhir tahun pelaksanaan, rencana dilakukan perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian kembali pada perkiraan sasaran-sasaran dan proyek-proyek untuk rencana tahun-tahun berikutnya.

3.4.6.2. Dilihat dari Tingkat Keluwesan

Dalam suatu negara sasaran-sasaran perencanaan dapat dilakukan dengan sangat kaku, atau dapat juga dilaksanakan dengan luwes. Dilihat dari segi keluwesannya (Kunarjo, 1993, Hal. 12) perencanaan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

(1) Perencanaan Prespektif

Adalah pengertian lain dari preskripsi atau resep. Perencanaan seperti ini pelaksanaannya dilakukan menurut resep yang ada, yaitu resep dari perencanaannya itu sendiri. Oleh karena itu perencanaan seperti ini biasanya sangat kaku. Sasaran-sasarannya harus dapat dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

(2) Perencanaan Indikatif.

Adalah Perencanaan yang sasarannya merupakan indikasi dari apa yang diinginkan untuk dicapai. Walaupun tampaknya perencanaan indikatif ini cukup luwes tetapi tidak berarti bahwa

penyimpangan-penyimpangan terhadap sasaran program dapat dilakukan dengan bebas.

Di dalam perencanaan indikatif biasanya mencakup :

- (a). Arah perencanaan yang dituju.
- (b). Urutan prioritas.
- (c). Tidak mendasarkan atas model yang kaku.

3.4.6.3. Berdasarkan sistem ekonomi.

Perencanaan berdasarkan sistem ekonomi dibagi menjadi :

(1) *Kapitalisme.*

Perekonomian yang diterapkan adalah “*free private enterprise system*”, perekonomian diatur melalui mekanisme pasar dan tidak direncanakan secara terpusat oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi hanya direncanakan oleh perusahaan swasta, sedangkan negara hanya berfungsi menjaga keamanan, pertahanan, pengadilan, penarikan pajak, dan mengatur kebijaksanaan moneter saja Suryana (2000, Hal. 119) mengutip Hasibuan (1987).

Untuk mencapai tujuan tersebut menurut Jhingan (1985) dalam Suryana (2000, Hal. 120) pemerintah dengan sistem kapitalisnya menjalankan tiga fungsi, yaitu meliputi :

- (a). mengambil langkah-langkah yang tepat agar pemerintah agregatif tidak terlalu kecil atau terlalu besar, sehingga terhindar dari resesi atau inflasi. Untuk itu pemerintah

mendirikan lembaga kredit dan moneter serta menerapkan kebijaksanaan fiskal sesuai dengan situasi ekonomi.

- (b). Mencegah pemusatan monopoli. Di dalam kapitalisme monopoli mengganggu mekanisme pasar. Bila mekanisme pasar itu terganggu berarti sumber-sumber ekonomi tidak dapat dimanfaatkan secara efisien. Untuk mencegah monopoli dan praktik monopolistik, pemerintah menerapkan kebijakan anti-monopolistik dan bahkan menasionalisasikan perusahaan monopolistik demi kepentingan masyarakat.
- (c). Mengambil langkah-langkah bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, taman umum, jalan raya, jembatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

(2). *Sosialisme*

Dalam sistem sosial, sumber-sumber ekonomi dan kehidupan diatur secara sentral oleh pemerintah melalui perencanaan terpusat. Dalam system ini dianut *system "planning by direction"*. Ada suatu badan perencanaan pusat yang merumuskan suatu rencana secara komperhensif. Masalah pokok perekonomian seperti apa (What) dan seberapa banyak barang dan jasa akan diproduksi, bagaimana (how), kapan (when) dan dimana (where) akan diproduksi dan untuk siapa dilaksanakan semuanya diputuskan oleh badan tersebut.

Semua aspek yang menyangkut tujuan sosialisme, seperti permintaan agregat, full employment, pemenuhan permintaan masyarakat, alokasi faktor-faktor produksi, distribusi pendapatan nasional, jumlah akumulasi modal atau pembangunan ekonomi dan sebagainya diatur dan diawasi secara terpusat oleh badan tersebut.

(3) *Campuran*

Ciri-ciri utama dalam ekonomi campuran adalah lembaga-lembaga produksi dimiliki swasta, tetapi mendapat kontrol dan pengawasan dari pemerintah.

Gambaran paduan situasi antara kebebasan pasar ekstrim dengan pengendalian kolektif menurut Todaro (1985) dalam Suryana (2000, Hal. 121) dapat didefinisikan menjadi dua komponen utama yaitu :

- (a). Pemerintah dengan seksama memanfaatkan tabungan dalam negeri dan sumberdaya keuangan dari luar negeri untuk membiayai proyek-proyek investasi pemerintah dan untuk memobilisasikan serta sebagai saluran sumberdaya langka yang dialirkan ke daerah-daerah yang dapat diharapkan menjadi sumbangan bagi realisasi tujuan pembangunan jangka panjang (misalnya pembangunan jalan kereta api, sekolah, proyek hidrolistik, komponen infrastruktur lainnya termasuk penciptaan subsidi impor).

(b). Kebijakan ekonomi pemerintah seperti perpajakan, perijinan, kuota, kebijaksanaan harga dan upah dimaksudkan untuk menstimulir, mengatur bahkan mengendalikan aktivitas ekonomi sektor swasta agar terjamin hubungan harmonis antara keinginan para usahawan swasta dan tujuan sosial dari pemerintah pusat.

Konsep perekonomian campuran biasanya dianut oleh negara-negara terbelakang, dengan maksud untuk meningkatkan laju perekonomian berdasarkan prinsip keterbatasan faktor-faktor yang ada di negara sedang berkembang Jhingan (1988) seperti dikutip Suryana (2000, Hal. 121).

3.4.6.4. Dilihat Dari Ruang Lingkup

Dilihat dari ruang lingkup Kunarjo, 1993, Hal. 11) perencanaan dapat dibagi menjadi dua yaitu ;

(1) Perencanaan Agregatif atau Komperhesif

Perencanaan agregatif atau komperhensif meliputi perencanaan seluruh perekonomian secara global. Perencanaan ini dimulai dengan proyeksi peningkatan pendapatan atau produksi dalam periode tertentu. Perencanaan komperhensif atau agregatif ini mengikutsertakan model-model pertumbuhan yang memproyeksikan pertumbuhan fariabel-fariabel ekonomi seperti pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah, lonsumsi, tabungan, investasi, impor, ekspor, kesempatan kerja, jumlah

permintaan, jumlah penawaran, tingkat bunga, perpajakan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sasarannya meliputi sektor-sektor pemerintah maupun sektor-sektor swasta.

(2) Perencanaan Pasrial (projec by projec)

Perencanaan ini dimulai secara sepotong-sepotong melalui pembangunan proyek-proyek. Infestasi pada proyek-proyek ini kadang-kadang sulit dihubungkan dengan keseluruhan perencanaan komperahensif, bahkan kadang-kadang pula pembangunan proyek ini ranpa disadari dengan pembangunan jangka panjangnya. Proyel-proyek ini biasanya ditujukan untuk menanggulangi secara jangka pendek, misalnya peningkatan taraf hidup, peningkatan ekspor, dan lain sebagainya.

3.5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi derah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk meeperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta-petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar,

organisasi-organisasi sosial-haris mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai unit ekonomi (economic entity) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

3.5.1. Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di negara sedang berkembang, mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah tetap diperlukan, apabila ingin mencapai proses pembangunan yang lebih cepat. Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati sebagai daerah yang ada.

3.5.2. Implikasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada tiga implikasi pokok dari perencanaan ekonomi daerah :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya ; administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

3.6. Landasan Teori Rumus

Teknik analisis yang digunakan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka kami akan menggunakan teknik analisis Shift-share klasik dan location quotient (LQ). Analisis Shift-share sering diikuti oleh penggunaan Location-Quotion sebagai salah satu teknik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan apakah sektor ekonomi regional, yang pertumbuhannya baru saja diurai oleh analisis Shift-share, basic/potensial atau tidak (Prasetyo Soepono, 2001, Hal. 41)

3.6.1. Analisis Shift-share Klasik

Pendekatan Shift-share adalah suatu teknik untuk menunjuk temukan sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional. Teknik ini membandingkan laju sektor-sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan itu.

Keterkaitan ekonomi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Bentuk dan keterkaitan itu ada dua macam yaitu hubungan daerah yang satu dengan daerah lainnya atau hubungan antar sektor satu dengan sektor lainnya dan hubungan seperti ini disebut hubungan Shift, dan hubungan antara daerah yang lebih rendah tingkat administrasinya dengan daerah yang lebih tinggi administrasinya disebut hubungan Share.

Melalui penggunaan metode Shift-share ini akan diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sebagai perubahan (D) suatu variabel daerah yaitu pendapatan (PDRB) selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh Pertumbuhan Nasional (N) Bauran Industri/Industrial Mix (M) Keunggulan Kompetitif (C) dan Pengaruh Alokasi/Spesialisasi (A) Prasetyo Supono, (1993, Hal. 44).

Untuk menganalisis sektor i di wilayah j dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Shift-share sebagaimana dikutip Supono (1993, Hal. 44).

$$(1). D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

$$(2). D_{ij} = E^*_{ij} - E_{ij}$$

$$(3). N_{ij} = E_{ij} \times R_n$$

$$(4). M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n)$$

$$(5). C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in})$$

Dimana :

R_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di wilayah j .

R_{in} = laju pertumbuhan sektor i di wilayah regional/nasional.

R_n = laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional/nasional.

$$(6). R_{ij} = (E^*_{ij} - E_{ij})/E_{ij}$$

$$(7). R_{in} = (E^*_{in} - E_{in})/E_{in}$$

$$(8). R_n = (E^*_n - E_n)/E_n$$

Dimana :

E_{ij} = pendapatan sektor i di wilayah j .

E_{in} = pendapatan sektor i di wilayah regional/nasional.

E_n = pendapatan pada tingkat regional/nasional.

Semuanya diukur pada suatu tahun dasar. *Superscript** menunjukkan pendapatan pada tahun akhir analisis.

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional (3), bauran industri (4) dan keunggulan kompetitif (5) dapat ditentukan bagi sesuatu sektor i atau dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan S-S untuk sektor i di wilayah j (Suepono, 1993, Hal. 48) :

$$D_{ij} = E_{ij} \times R_n - E_{ij} (R_{in} - R_n) + E_{ij} (R_{ij} - R_{in})$$

Persamaan S-S ini membebaskan tiap sektor wilayah dengan laju pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional selama kurun waktu analisis. Ini tercermin pada persamaan (3). Persamaan (3) menunjukkan bahwa semua wilayah dan sektor-sektor hendaknya paling sedikit tumbuh dengan laju pertumbuhan nasional, yakni R_n . Sesudah ditentukan besarnya pertumbuhan nasional, pertumbuhan suatu variabel wilayah yang tersisa merupakan suatu net gain atau net loss (atau shift) bagi wilayah yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, perbedaan antara perubahan nyata pendapatan (sebagai variabel wilayah) dan pengaruh pertumbuhan nasional (persamaan 3) disebut net shift sektor i di wilayah j . Net shift ini juga sama dengan total dari pengaruh bauran industri (persamaan 4) dan pengaruh keunggulan kompetitif (persamaan 5).

Pengaruh bauran industri untuk sektor i akan positif di semua wilayah bila pendapatan (sebagai variabel wilayah) di wilayah i tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan pendapatan keseluruhan ($R_{in} > R_n$). Demikian pula pengaruh bauran industri menjadi nol bila $R_{in} = R_n$ atau negatif bila $R_{in} < R_n$. Selanjutnya keunggulan kompetitif untuk sektor i di wilayah j dapat positif, nol atau negatif, tergantung apakah pertumbuhan

pendapatan regional disektor ini lebih cepat dari pada ($R_{ij} > R_{in}$), sama dengan ($R_{ij} = R_{in}$) atau lebih lambat ($R_{ij} < R_{in}$) dari pada pertumbuhan disektor yang bersangkutan pada tingkat nasional. Selain itu suatu keunggulan kompetitif yang positif atau negatif mempunyai implikasi bahwa share suatu wilayah atas pendapatan nasional di suatu sektor tertentu, naik atau turun selama kurun waktu analisis.

Bila tiap komponen (pengaruh) shift share dijumlah untuk semua sektor tanda hasil penjumlahan itu menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah dalam pendapatan nasional. Pengaruh bauran industri total akan positif atau negatif di wilayah-wilayah proporsi pendapatan di atas rata-rata disektor-sektor dengan pertumbuhan yang cepat (statik atau menurun ditingkat nasional). Demikian pula pengaruh keunggulan kompetitif total akan positif atau negatif di wilayah-wilayah tempat pendapatan nasional berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari pada struktur bauran industri atau pendapatan nasional.

Kemampuan teknik analisis shift-share untuk memberikan dua indikator positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkebang secara nasional dan bahwa sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih cepat dari pada rata-rata nasional untuk sektor-sektor itu, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan.

3.6.2. Analisis Location Quotien (LQ)

Analisis Location-Quotien (LQ) merupakan metode yang lazim digunakan untuk mengetahui secara empiris suatu kegiatan tertentu merupakan basis atau bukan basis. Studi basis ekonomi menemu-kenali sumber-sumber utama dari pendapatan sebagai suatu basis ekonomi dari suatu wilayah.

Formula LQ (Hermanto, 2000, Hal.) adalah sebagai berikut :

$$LQ = (E_{ij} / E_j) / (E_{in} / E_n)$$

Dimana :

E_{ib} = pendapatan sektor i di wilayah j

E_b = pendapatan daerah

E_{iin} = pendapatan sektor i di wilayah nasional

E_n = pendapatan nasional

Interprestasi dari perhitungan adalah :

1. jika nilai $LQ > 1$ maka wilayah j untuk sektor i ada spesialisasi (tingkat spesialisasi wilayah > tingkat spesialisasi nasional)
2. jika nilai $LQ = 1$ maka wilayah spesialisasi wilayah sama dengan tingkat spesialisasi nasional
3. jika nilai $LQ < 1$ maka tidak ada spesialisasi (tingkat spesialisasi wilayah < tingkat spesialisasi nasional)

Umumnya, perekonomian patokan berupa negara yang paling mendekati perekonomian yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan mengambil asumsi perekonomian acuan adalah perekonomian yang self-

sufficeint, LQ yang lebih besar dari satu berarti perekonomian daerah memiliki pendapatan lebi dari cukup di sektor i untuk menyediakan daerah itu dengan produk-produknya. Dengankata lain, bila $LQ > 1$, industri i merupakan industri basic. Bila hasil bagi lokasi itu kurang dari 1, berarti daerah itu kekurangan produk yang dihasilkan oleh sektor i dan harus mendatangkan atau mengimpor produk itu bila pola konsumsi di daerah itu ingin dipertahankan atau bil $LQ < 1$, industri i merupakan industri non-basis.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sektor-sektor perekonomian di Daerah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian perbandingannya adalah Jawa Tengah dan wilayah eks. Karesidenan Surakarta, pemilihan eks. Karesidenan Surakarta karena **secara ekonomis dekat**. Menurut pengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian di lokasi ini tahun 1995 – 2000, sesuai dengan perhitungan *shift – share* (SS) dan perhitungan *Location Quotient* (LQ) permasalahan di atas.

4.2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data yang berasal dari laporan-laporan penelitian dan instansi tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Data-data yang dibutuhkan adalah :

- (1) Produk Domestik Bruto menurut sektor tahun 1995-2000 atas dasar harga konstan.
- (2) Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo menurut sektor tahun 1995-2000 atas dasar harga konstan 1995.

Data dari penelitian ini bersumber dari :

- (1) Badan Pusat Statistik Kabupaten Kabupaten Sukoharjo.
- (2) BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Badan Pusat Statistik Surakarta.

4.3. Definisi Variabel

- (1) *Produk Domestik Bruto* oleh seluruh unit usaha nasional, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi secara nasional.
- (2) *Produk Domestik Regional Bruto* Kabupaten Sukoharjo adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Sukoharjo tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut.

4.4. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu metode analisis secara deskriptif/kualitatif dan secara kuantitatif. Metode analisis deskriptif/kualitatif yaitu suatu metode yang tidak menggunakan rumus-rumus, tetapi sifatnya berupa penjelasan dan keterangan pelengkap. Sedangkan metode analisis kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan rumus tertentu yang sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Shift-Share dan Location Quotien (LQ). Adapun bentuk umum persamaan dari analisis Shift-Share dan Location Quotien (LQ) serta komponen-komponennya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Shift-Share:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (1)$$

Keterangan:

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan per-sektor yang dikonotasikan sebagai (Y)

$$D_{ij} = Y * ij - Y_{ij} \quad (2)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} . m \quad (3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - m) \quad (4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (5)$$

Dimana:

r_{ij} , r_{in} dan m mewakili laju pertumbuhan wilayah dan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = \frac{(Y_{ij}^* - Y_{ij})}{Y_{ij}} \quad (6)$$

$$r_{in} = \frac{(Y_{in}^* - Y_{in})}{Y_{in}} \quad (7)$$

$$m = \frac{(Y_n^* - Y_n)}{Y_n} \quad (8)$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = Y_{ij} . m + Y_{ij} (r_{in} - m) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (9)$$

Keterangan:

D adalah Komponen Pertumbuhan Secara Keseluruhan

N adalah Komponen Pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah

M adalah Komponen Bauran Industri (Industry mix)

C adalah Komponen Keunggulan Kompetitif (Regional share)

r_{ij} adalah Pertumbuhan sektor i di wilayah j

r_{in} adalah Pertumbuhan sektor i ditingkat nasional.

r_n adalah Pertumbuhan nasional

Y_{ij} adalah Pendapatan di sektor i di wilayah j

Y_{in} adalah Pendapatan di sektor i ditingkat nasional

Y_n adalah Pendapatan Nasional

Y^* adalah Pendapatan tahun terakhir analisis

2. Analisis Location Quotient (LQ):

$$LQ = \frac{\frac{y_i}{y_t}}{\frac{Y_i}{Y_t}}$$

Keterangan :

LQ adalah Koefisien LQ

y_i adalah Pendapatan di sektor tertentu di Kabupaten Sukoharjo

y_t adalah Pendapatan total daerah (PDRB) di Kabupaten Sukoharjo

Y_i adalah Pendapatan di sektor tertentu di tingkat Propinsi

Y_t adalah Pendapatan total nasional (PDB)

Interpretasi dari perhitungan tersebut adalah:

- (1) $LQ > 1$ merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut suatu daerah lebih besar di banding sektor sejenis secara nasional.
- (2) $LQ = 1$ berarti kemampuan produksi tersebut di suatu daerah sama dengan sektor sejenis secara nasional.

- (3) $LQ < 1$ merupakan sektor non basis dan kemampuan produksi sektor tersebut di suatu daerah lebih kecil dibanding sektor sejenis secara nasional.

Dalam penelitian ini digunakan asumsi sebagai berikut:

- (1) Selera dan pola pengeluaran di daerah-daerah di propinsi Jawa Tengah dianggap sama.
- (2) Setiap penduduk di setiap daerah mempunyai permintaan terhadap suatu barang dan jasa pada tingkat nasional dianggap sama.
- (3) Tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang dan jasa di setiap daerah dianggap sama.

BAB V

DATA DAN ANALISA DATA

5.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber penerbitan, seperti data yang diterbitkan oleh BPS, BAPPEDA dan sumber-sumber lain yang terkait dengan obyek yang diteliti dimulai dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Data-data tersebut adalah data pendapatan sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo , PDRB Karisidenan Surakarta dan PDRB Propinsi Jawa Tengah tahun 1995-2000 atas Dasar Harga Konstan 1995.

Data-data tersebut akan digunakan untuk menganalisis perubahan pertumbuhan dan potensi 9 sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan 9 sektor ekonomi pada tingkat Karisidenan Surakarta dan potensi 9 sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan 9 sektor ekonomi pada tingkat Propinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini digunakan dua alat analisis, yaitu analisis *Shift-Share* dan analisis *Location Quotient (LQ)*.

Pada analisis *Shift-Share* data yang digunakan sesuai dengan data teknik analisis tersebut adalah data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo dan Produk Domestik Regional Bruto se-Karisidenan Surakarta serta Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah

menurut sektor usaha, awal tahun analisis yaitu tahun 1995 dan akhir tahun analisis yaitu tahun 2000, yang berarti membandingkan pertumbuhan sektor ekonomi pada awal tahun dan akhir tahun penelitian. Sedangkan pada analisis LQ, data yang dipakai adalah data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo dan Produk Domestik Regional Bruto se-Karisidenan Surakarta serta Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah selama 5(lima) tahun yaitu dari tahun 1995 hingga tahun 2000.

5.2. Hasil Analisis Shift-Share

Berdasarkan hasil perhitungan alat analisis Shift-Share dapat dilihat adanya perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Untuk suatu wilayah pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij) dan keunggulan kompetitif (Cij) dapat ditentukan bagi suatu sektor i atau di jumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Perubahan-perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel 5.1. dan tabel 5.2.

1. Sektor Pertanian

Berdasarkan analisis *Shift-Share* sektor pertanian tahun 1995-2000 dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pengaruh Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) misalnya, sektor pertanian kabupaten ini mempunyai

mempunyai kontribusi yang positif sebesar 4.579,911 juta terhadap pertumbuhan regional se- Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 14.154,496 juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pengaruh lainnya yaitu pengaruh Komponen Bauran Industri (Mij) menunjukkan nilai yang positif sebesar 39.662, 498 juta, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian pada tingkat Karisidenan mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih baik di banding dengan pertumbuhan keseluruhan se-Karisidenan Surakarta, namun mempunyai nilai yang negatif sebesar -5.865,087 juta, menunjukkan sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap pertumbuhan keseluruhan secara regional Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) kontribusi sektor pertanian baik pada tingkat Karisidenan maupun pada tingkat Propinsi menunjukkan nilai yang negatif yaitu masing-masing sebesar -95.327,959 juta dan sebesar -59.374,961, ini berarti kontribusi sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo negatif terhadap sektor sejenis dalam pertumbuhan pendapatan Regional Bruto Karisidenan Surakarta dan pertumbuhan pendapatan Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah.

Untuk jumlah keseluruhan (Dij), sektor pertanian Kabupaten Sukoharjo mempunyai pengaruh yang negatif baik pada tingkat Karisidenan

maupun pada tingkat Propinsi yaitu sebesar -51.085,55 juta, ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor tersebut negatif atau pertumbuhan sektor tersebut cenderung untuk menghambat pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

2. Sektor Pertambangan dan Galian

Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai kontribusi yang positif sebesar 230,065 juta terhadap pertumbuhan regional se- Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 711,030 juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pengaruh lainnya adalah pengaruh Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai nilai yang positif sebesar 1.039,924 juta pada tingkat Karisidenan Surakarta dan sebesar 2.916,070 juta pada tingkat Propinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang positif atau mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih baik di banding dengan pertumbuhan keseluruhan baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh lainnya adalah Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) kontribusi sektor pertambangan dan pengolahan pada tingkat Karisidenan

Surakarta adalah sebesar 592,300 juta ini berarti kontribusi sektor pertambangan dan penggalan kabupaten ini positif atau memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih cepat dibanding sektor sejenis, sedang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah kontribusi sektor pertambangan dan penggalan adalah negatif sebesar -1.764,810 juta atau lebih lambat pertumbuhannya dibanding sektor sejenis.

Untuk Komponen Keseluruhan (Dij), sektor pertambangan dan penggalan Kabupaten Sukoharjo mempunyai nilai sebesar 1.862,29 juta kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut positif atau pertumbuhan sektor tersebut cenderung untuk mendorong pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

3. Sektor Industri Pengolahan

Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) sektor industri pengolahan mempunyai mempunyai kontribusi yang positif sebesar 3.765,585 juta terhadap pertumbuhan regional se- Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 11.637,796 juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pengaruh lainnya adalah pengaruh Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai nilai yang negatif sebesar -46.840,870 juta pada tingkat Karisidenan Surakarta dan sebesar -8.524,843 juta pada tingkat

Propinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang negatif atau mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih lambat di banding dengan pertumbuhan keseluruhan baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij), kontribusi sektor industri pengolahan adalah positif baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah yang masing-masing nilainya adalah sebesar 98.117,894 juta dan sebesar 51.929 juta, ini mempunyai arti bahwa kontribusi sektor industri pengolahan Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding kontribusi sektor sejenis pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah

Jumlah keseluruhan (Dij), sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar 55.042,61 juta, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut positif atau pertumbuhan sektor tersebut cenderung untuk mendorong pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

4. Sektor listrik, Gas dan Air Bersih

Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) sektor listrik, gas dan air bersih mempunyai mempunyai kontribusi yang positif sebesar 130,901 juta

terhadap pertumbuhan regional se- Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 404,560 juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pengaruh lainnya adalah pengaruh Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai nilai yang positif sebesar 3.481,742 juta pada tingkat Karisidenan Surakarta dan sebesar 4.722,834 juta pada tingkat Propinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang positif atau mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih baik di banding dengan pertumbuhan keseluruhan baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh lainnya adalah Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih pada tingkat Karisidenan Surakarta adalah sebesar 1.213,715 juta, ini berarti sektor listrik, gas dan air bersih Kabupaten ini positif atau memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih cepat dibanding sektor sejenis, sedang pada tingkat Propinsi Jawa Tengah kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih adalah negatif sebesar -301,034 juta atau lebih lambat pertumbuhannya dibanding sektor sejenis.

Komponen Keseluruhan (Dij), sektor listrik, gas dan air bersih Kabupaten Sukoharjo mempunyai nilai sebesar 4.826,36 juta kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut positif atau pertumbuhan

sektor tersebut cenderung untuk mendorong pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

5. Sektor Bangunan

Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) sektor bangunan mempunyai mempunyai kontribusi yang positif sebesar 722,416 juta terhadap pertumbuhan regional se- Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 404,5juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai nilai sebesar 3.790,748 juta pada tingkat Karisidenan Surakarta, menunjukkan bahwa sektor bangunan mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan keseluruhan pada tingkat Karisidenan Surakarta, namun mempunyai nilai yang negatif sebesar -6.192,680 juta pada tingkat Propinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa sektor bangunan Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang negatif atau mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih lambat di banding dengan pertumbuhan keseluruhan pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh selanjutnya adalah pengaruh Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij), kontribusi sektor bangunan pada tingkat Karisidenan Surakarta adalah sebesar -5.874,895 juta, ini berarti sektor bangunan tumbuh lebih lambat dibanding sektor sejenis, sedang pada tingkat Propinsi Jawa

Tengah kontribusi sektor bangunan adalah positif sebesar 2.598,278 juta memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih cepat dibanding sektor sejenis.

Jumlah keseluruhan (Dij), sektor bangunan Kabupaten Sukoharjo mempunyai pengaruh yang negatif baik pada tingkat Karisidenan maupun pada tingkat Propinsi yaitu sebesar -1.361,73 juta, ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor tersebut negatif atau pertumbuhan sektor tersebut cenderung untuk menghambat pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai mempunyai kontribusi yang positif sebesar 2.990,697 juta terhadap pertumbuhan regional se- Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 9.242,933 juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pengaruh lainnya adalah pengaruh Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai nilai yang negatif sebesar -5.459,729 juta pada tingkat Karisidenan Surakarta, hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang negatif atau tumbuh lebih lambat di banding dengan pertumbuhan keseluruhan pada tingkat Karisidenan Surakarta, pada tingkat Propinsi Jawa

Tengah nilainya positif sebesar 19.924,174, hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang positif atau mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih baik di banding dengan pertumbuhan keseluruhan pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij), kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah positif baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah yang masing-masing nilainya adalah sebesar 84.531,432 juta dan sebesar 52.895,292 juta, ini mempunyai arti bahwa kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding kontribusi sektor sejenis pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah

Jumlah keseluruhan (Dij), sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi sebesar 82.062,40 juta, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut positif atau pertumbuhan sektor tersebut cenderung untuk mendorong pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Pengaruh Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) pada sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai kontribusi yang positif sebesar 484,400 juta terhadap pertumbuhan regional se- Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 1.497,070 juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pengaruh lainnya adalah pengaruh Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai nilai yang positif sebesar 18.269,627 juta pada tingkat Karisidenan Surakarta dan sebesar 9.434,049 juta pada tingkat Propinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang positif atau mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih baik di banding dengan pertumbuhan keseluruhan baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi baik pada tingkat Karisidenan maupun pada tingkat Propinsi menunjukkan nilai yang negatif yaitu masing-masing sebesar -9.024,268 juta dan sebesar -1.201,360, ini berarti kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi Kabupaten Sukoharjo negatif terhadap sektor sejenis dalam pertumbuhan pendapatan Regional Bruto Karisidenan

Surakarta dan pertumbuhan pendapatan Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah.

Untuk jumlah keseluruhan (Dij), sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai kontribusi sebesar 9.729,76 hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang positif atau sektor tersebut cenderung untuk mendorong pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Pengaruh Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mempunyai kontribusi yang positif sebesar 754,354 juta terhadap pertumbuhan regional se-Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 2331,378 juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pengaruh Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai nilai sebesar 2.060,989 juta pada tingkat Karisidenan Surakarta, menunjukkan bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan keseluruhan pada tingkat Karisidenan Surakarta, namun mempunyai nilai yang negatif sebesar -11.174,121 juta

pada tingkat Propinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang negatif atau mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih lambat di banding dengan pertumbuhan keseluruhan pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij), kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah positif baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah yang masing-masing nilainya adalah sebesar 899,176 juta dan sebesar 12.557,263 juta, ini mempunyai arti bahwa kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding kontribusi sektor sejenis pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Jumlah keseluruhan (Dij), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mempunyai kontribusi sebesar 3.714,52 hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang positif atau sektor tersebut cenderung untuk mendorong pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

9. Sektor Jasa - jasa

Pengaruh Komponen Pertumbuhan Regional (Nij) pada sektor jasa-jasa mempunyai kontribusi yang positif sebesar 2.100,610 juta terhadap pertumbuhan regional se- Karisidenan Surakarta dan kontribusi yang positif pula sebesar 6.492,064 juta terhadap pertumbuhan regional Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pengaruh lainnya adalah pengaruh Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai nilai yang negatif sebesar -21.478,439 juta pada tingkat Karisidenan Surakarta dan sebesar -9.600,122 juta pada tingkat Propinsi Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa-jasa Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang negatif atau mempunyai kemampuan untuk tumbuh lebih lambat di banding dengan pertumbuhan keseluruhan baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij), kontribusi sektor jasa-jasa adalah positif baik pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah yang masing-masing nilainya adalah sebesar 36.994,799 juta dan sebesar 20.725,027 juta, ini mempunyai arti bahwa kontribusi sektor jasa-jasa Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding kontribusi sektor sejenis

pada tingkat Karisidenan Surakarta maupun pada tingkat Propinsi Jawa Tengah

Untuk jumlah keseluruhan (Dij), sektor jasa-jasa mempunyai kontribusi sebesar 17.616,97 juta, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut positif atau pertumbuhan sektor tersebut cenderung untuk mendorong pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta maupun PDRB Propinsi Jawa Tengah.

TABEL 5.1
HASIL ANALISIS
SHIFT – SHARE
KABUPATEN SUKOHARJO >< SE-KARESIDENAN SURAKARTA

LAPANGAN USAHA	Nij	Mij	Cij	Dij
1. Petanian	4.579,9113742872	39.662,498415175	-95.327,959789446	-51.085,55
2. Pertambangan dan Pengalihan	230,06511558965	1.039,9246744872	592,30020992198	1.862,29
3. Industri Pengolahan	3.765,5858013541	-46.840,870591899	98.117,894790524	55.042,61
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	130,90188288116	3.481,742834941	1.213,7152821772	4.826,36
5. Bangunan dan Kontruksi	722,416288727	3.790,74877844	-5.874,8950671566	-1.361,73
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.990,6974075144	-5.459,7294848714	84.531,43207716	82.062,4
7. Angkutan dan Komunikasi	484,400916866439	18.269,627261455	-9.024,2681783214	9.729,67
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	754,3543158733	2.060,9894621308	899,17622199519	3.714,52
9. Jasa	2.100,6103349218	-21.478,43958446	36.994,799249527	17.616,97
PDRB	15.758,943438011	-5.473,508234608	112.122,19479638	112.407,63

TABEL 5.2
HASIL ANALISIS
SHIFT – SHARE
KABUPATEN SUKOHARJO >< PROPINSI JAWA TENGAH

LAPANGAN USAHA	Nij	Mij	Cij	Dij
1. Petanian	14.154,496217285	-5.865,0847905888	-59.374,961426681	-51.085,55
2. Pertambangan dan Penggalian	711,03031089763	2.916,0706526331	-1.764,8109635318	1.862,29
3. Industri Pengolahan	11.637,796341769	-8.524,8431533815	51.929,67992474	55.042,61
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	404,56027522265	4.722.8340942601	-301,03436948345	4.826,36
5. Bangunan dan Kontruksi	2.232,671724501	-6.192,6801485521	2.298,2784240555	-1.361,73
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.242,933253986	19.924,174283251	52.895,292462753	82.062,4
7. Angkutan dan Komunikasi	1.497,0706603408	9.434,0499858365	-1.201,3606461784	9.729,76
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.331,3781507798	-11.174,121508437	12.557,263357657	3.714,52
9. Jasa	6.492,0647169225	-9.600,1222946759	20.725,027577742	17.616,97
PDRB	48.704,0016517044	-4.359,7228796544	78.063,374341073	122.407,63

5.3. Hasil Analisis Location Quotion (LQ)

Berdasarkan data yang didapat yaitu data PDRB di tiap sektor dan PDRB total di Kabupaten Sukoharjo serta PDRB di tiap sektor dan PDRB total se-Karisidenan Surakarta dan di Propinsi Jawa Tengah, sebagai daerah acuan yang lebih tinggi tingkat administrasinya, maka dapat di hitung Location Quotion untuk mengetahui apakah suatu industri atau sektor ekonomi di daerah tersebut merupakan salah satu sektor basis atau sektor andalan atau ada tidaknya spesialisasi industri di daerah tersebut.

5.3.1. LQ Kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta

Pada hasil analisis LQ Kabupaten sukoharjo yang di bandingkan dengan Karisidenan Surakarta pada sembilan sektor ekonomi, diketahui ada lima sektor yang diklasifikasikan menjadi sektor basis atau menjadi spesialisasi industri dan empat sektor yang lain bukan merupakan sektor andalan bagi Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3.

1. Potensi Sektor Pertanian

Sektor pertanian kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan nilai LQ yang cenderung menurun yaitu sebesar 0.99 pada tahun 1995 menjadi sebesar 0.64 pada tahun 2000.

Nilai LQ sektor pertanian adalah dibawah satu atau $LQ < 1$, hal ini berarti bahwa sektor pertanian bukan merupakan sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

2. Potensi Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor Pertambangan Kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan nilai LQ yang cenderung menurun yaitu sebesar 2.40 pada tahun 1995 menjadi sebesar 2.25 pada tahun 2000.

Nilai LQ sektor Pertambangan adalah lebih dari satu atau $LQ > 1$, hal ini berarti bahwa sektor Pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

3. Potensi Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan nilai LQ yang cenderung naik yaitu sebesar 1.10 pada tahun 1995 menjadi sebesar 1.50 pada tahun 2000.

Nilai LQ sektor Industri Pengolahan adalah lebih dari satu atau $LQ > 1$, hal ini berarti bahwa sektor Industri Pengolahan juga merupakan salah satu sektor yang menjadi sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

4. Potensi Sektor Listrik, Gas dan Air bersih

Sektor Listrik, gas dan air bersih Kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 menunjukkan nilai LQ yang cenderung naik yaitu sebesar 1.37 pada tahun 1995 menjadi sebesar 1.80 pada tahun 1997 namun kemudian terjadi penurunan kembali hingga tahun 2000 yaitu menjadi sebesar 1.37.

Nilai LQ sektor Industri Pengolahan adalah lebih dari satu atau $LQ > 1$, hal ini berarti bahwa sektor Industri Pengolahan juga merupakan salah satu sektor yang menjadi sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

5. Potensi Sektor Bangunan

Potensi sektor bangunan secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu dari 1.94 pada tahun 1995 menjadi 1.55 pada tahun 2000, pada tahun 1997 LQ sektor ini sebesar 1.78 dan menjadi sebesar 1.40 pada tahun 1998 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2000.

Nilai LQ sektor bangunan adalah lebih dari satu atau $LQ > 1$, hal ini berarti bahwa sektor bangunan juga merupakan salah satu sektor yang menjadi sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

6. Potensi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran Kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000

menunjukkan nilai LQ yang cenderung naik yaitu sebesar 0.70 pada tahun 1995 menjadi sebesar 0.92 pada tahun 2000.

Nilai LQ sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah dibawah satu atau $LQ < 1$, hal ini berarti bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran bukan merupakan sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

7. Potensi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor sektor pengangkutan dan komunikasi Kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan nilai LQ yang cenderung menurun yaitu sebesar 0.74 pada tahun 1995 menjadi sebesar 0.69 pada tahun 2000.

Nilai LQ sektor pengangkutan dan komunikasi adalah dibawah satu atau $LQ < 1$, hal ini berarti bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi bukan merupakan sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

8. Potensi Sektor Keuangan

Sektor sektor keuangan Kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan nilai LQ yang cenderung menurun yaitu sebesar 0.90 pada tahun 1995 menjadi sebesar 0.83 pada tahun 2000.

Nilai LQ sektor keuangan adalah dibawah satu atau $LQ < 1$, hal ini berarti bahwa sektor keuangan bukan merupakan sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

9. Potensi Sektor Jasa-jasa

Sektor sektor jasa-jasa Kabupaten Sukoharjo dan Karisidenan Surakarta dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan nilai LQ yang cenderung naik yaitu sebesar 1.32 pada tahun 1995 menjadi sebesar 1.59 pada tahun 2000.

Nilai LQ sektor jasa-jasa adalah lebih dari satu atau $LQ > 1$, hal ini berarti bahwa sektor jasa-jasa merupakan sektor andalan atau basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

5.3.2. LQ Kabupaten Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah

Pada hasil analisis LQ Kabupaten sukoharjo yang di bandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah pada sembilan sektor ekonomi, diketahui ada dua sektor yang diklasifikasikan menjadi sektor basis atau menjadi spesialisasi industri dan tujuh sektor yang lain bukan merupakan sektor andalan bagi Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.4.

1. Potensi Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan atau sektor basis bagi Kabupaten Sukoharjo, dimana dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 nilai LQ sektor pertanian selalu lebih dari satu ($LQ > 1$).

Pada tahun 1995 nilai LQ sektor pertanian adalah sebesar 1,38 dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2000 yaitu menjadi sebesar 1,03. Hal ini berarti sektor ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan dimasa yang akan datang.

2. Potensi Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri bukan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai LQ terus mengalami penurunan hingga tahun 1998 dan 1999 yaitu sebesar 0.96 dan 0.10, walaupun pada tahun 2000 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1.01. hal ini berarti sektor pertambangan tidak dapat menjadi sektor unggulan namun memiliki potensi yang baik untuk terus dikembangkan.

3. Potensi Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri bukan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai LQ sektor ini dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 selalu dibawah satu ($LQ < 1$).

Pada tahun 1995 nilai LQ sektor industri sebesar 0.76 dan mengalami kenaikan pada tahun 1996 dan 1997, namun kemudian mengalami penurunan, pada tahun 2000 nilai LQ adalah sebesar 0.86.

4. Potensi Sektor Listrik, Gas dan Air bersih

Sektor listrik bukan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai LQ sektor ini dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 selalu dibawah satu ($LQ < 1$).

Nilai LQ sektor listrik pada tahun 1995 adalah sebesar 1.06 kemudian menurun pada tahun 1996 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 1997 sebesar 1.16, namun hingga tahun 2000 nilai LQ selalu dibawah satu.

5. Potensi Sektor Bangunan

Sektor bangunan juga bukan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai LQ dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 selalu dibawah satu ($LQ < 1$).

Pada tahun 1995 nilai LQ sebesar 0.98 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 1999 menjadi sebesar 0.88, namun kemudian mengalami kenaikan menjadi sebesar 0.98 pada tahun 2000.

6. Potensi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan juga bukan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Sukoharjo, nilai LQ pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 selalu dibawah satu ($LQ < 1$), namun pada tahun 1999 dan 2000 nilai LQ adalah sebesar 1.02 dan 1.03. hal ini berarti bahwa sektor perdagangan memiliki potensi untuk lebih dikembangkan.

7. Potensi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor komunikasi juga bukan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai LQ dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 selalu dibawah satu ($LQ < 1$).

8. Potensi Sektor Keuangan

Nilai LQ sektor Keuangan Kabupaten Sukoharjo semakin meningkat dari tahun 1995 sebesar 0.94 kemudian pada tahun 1998 menjadi sebesar 1.12 dan pada tahun 2000 menjadi sebesar 1.17.

Sektor keuangan bukan salah satu sektor yang menjadi unggulan atau sektor basis bagi Kabupaten sukoharjo, namun menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi yang baik untuk terus dikembangkan.

9. Potensi Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa menjadi salah satu sektor yang diandalkan atau unggulan bagi Kabupaten Sukoharjo, dimana nilai LQ dari awal tahun sampai dengan akhir tahun adalah lebih dari satu ($LQ > 1$).

Nilai LQ pada tahun 1995 sebesar 1.25 dan menurun pada tahun 1996 dan 1997, setelah tahun 1998 nilai LQ meningkat hingga menjadi sebesar 1.36 pada tahun 2000.

Tabel 5.3
HASIL ANALISIS LOCATION QUOTION
KAB. SUKOHARJO DAN KARISIDENAN SURAKARTA

Sektor	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tahun						
1. Pertanian	0.99	0.87	0.82	0.77	0.69	0.64
2. Penggalian	2.40	2.31	2.42	2.23	2.16	2.25
3. Industri	1.10	1.37	1.37	1.32	1.38	1.50
4. Listrik	1.37	1.36	1.80	1.68	1.57	1.37
5. Bangunan	1.94	1.65	1.78	1.40	1.54	1.55
6. Perdagangan	0.70	0.71	0.75	0.84	0.87	0.92
7. Komunikasi	0.94	0.84	0.82	0.66	0.73	0.69
8. Keuangan	0.90	0.86	0.84	0.88	0.87	0.83
9. Jasa	1.32	1.15	1.15	1.63	1.65	1.59

Tabel 5.4
HASIL ANALISIS LOCATION QUOTION
KAB. SUKOHARJO DAN JAWA TENGAH

Sektor	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tahun						
1. Pertanian	1.38	1.24	1.23	1.19	1.07	1.03
2. Penggalian	1.20	1.18	1.16	0.96	0.10	1.01
3. Industri	0.76	0.94	0.95	0.83	0.85	0.86
4. Listrik	1.06	0.99	1.16	0.91	0.94	0.97
5. Bangunan	0.98	0.84	0.85	0.86	0.88	0.98
6. Perdagangan	0.88	0.88	0.90	0.99	1.02	1.03
7. Komunikasi	0.79	0.70	0.75	0.69	0.71	0.71
8. Keuangan	0.94	0.86	0.81	1.12	1.13	1.17
9. Jasa	1.25	1.15	1.15	1.26	1.35	1.36

BAB VI

KESIMPULAN DAN UMPLIKASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis *Shift-Share* serta analisis *Location Quotient (LQ)* pada sektor-sektor ekonomi sembilan sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disimpulkan beberapa hal :

A. Karisidenan Surakarta terhadap Kabupaten Sukoharjo

- Berdasarkan hasil analisis Shift – Share ditemukan bahwa PDRB Kabupaten Sukoharjo sebesar 15.758,94 adalah dikarenakan pengaruh pertumbuhan PDRB Karisidenan Surakarta terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo meskipun kenaikan PDRB Kabupaten Sukoharjo sebenarnya dapat mencapai 122.407 juta.
- Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai efek yang negatif, hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan atau penurunan PDRB Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 5.4730,50 juta. Sektor-sektor yang memberikan efek negatif adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa. Sedangkan sektor-sektor yang memberikan efek positif dari yang terbesar adalah pertanian, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, pertambangan dan galian, konstruksi dan bangunan, dan listrik, gas dan air bersih.
- Komponen Keunggulan Komperatif (Cij) mempunyai efek yang positif, hal ini meningkatkan PDRB Kabupaten Sukoharjo yaitu

sebesar 1120122,19 juta. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan komperatif adalah sektor pertambangan, sektor industri, sektor listrik, sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor jasa. Sedangkan sektor yang tidak memiliki keunggulan komperatif adalah sektor pertanian, sektor angkutan, dan sektor bangunan.

B. Propinsi Jawa Tengah terhadap Kabupaten Sukoharjo

- Berdasarkan hasil analisis Shift-Share ditemukan bahwa PDRN Kabupaten Sukoharjo sebesar 48.704 juta adalah dikarenakan pengaruh pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo sebenarnya dapat mencapai 122.407 juta.
- Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai efek yang negatif, hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan atau penurunan PDRB Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 4.359,72 juta. Sektor-sektor yang memberikan efek negatif adalah sektor pertanian sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan dan sektor jasa. Sedangkan sektor-sektor yang memberikan efek positif dari yang terbesar adalah perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, pertambangan dan galian, dan listrik, gas dan air bersih.
- Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) mempunyai efek yang positif, hal ini berarti meningkatkan PDRB Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 78.063 juta. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif adalah sektor industri, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor jasa. Sedangkan sektor yang

tidak memiliki keunggulan kompetitif adalah sektor pertanian, sektor angkutan, sektor pembangunan, sektor listrik, dan sektor bangunan.

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1995 sampai tahun 2000, maka dapat disimpulkan :

A. Karisidenan Surakarta terhadap Kabupaten Sukoharjo

- Spesialisasi regional yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo adalah sektor pertambangan, sektor industri, sektor listrik, sektor bangunan, dan sektor jasa. Sedangkan sektor-sektor yang lain tidak memiliki spesialisasi atau bukan menjadi sektor basis bagi Kabupaten Sukoharjo.

B. Propinsi Jawa Tengah terhadap Kabupaten Sukoharjo

- Sektor-sektor yang menjadi spesialisasi bagi Kabupaten Sukoharjo adalah sektor pertanian, dan sektor jasa, sedangkan sektor yang lain bukan merupakan sektor basis. Sektor perdagangan dan sektor keuangan memiliki potensi untuk dikembangkan karena menunjukkan hasil yang meningkatkan atau dari tidak ada spesialisasi menjadi ada spesialisasi. Sedangkan sektor listrik menunjukkan kecenderungan yang menurun yaitu dari adanya spesialisasi menjadi tidak ada spesialisasi.

6.2. IMPLIKASI

- Berdasarkan hasil perhitungan ditemukan bahwa ada 4 (empat) sektor yang menjadi unggulan atau memiliki keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Sukoharjo (menurut Karisidenan Surakarta maupun dari

Propinsi Jawa Tengah) yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor keuangan, dan sektor jasa.

- Sektor yang menjadi spesialisasi bagi Kabupaten Sukoharjo hanya sektor jasa. Sektor-sektor yang lain seperti sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor listrik, dan sektor bangunan merupakan sektor-sektor yang memiliki potensi yang sangat baik untuk lebih dikembangkan. Sedangkan sektor perdagangan dan sektor keuangan bukan merupakan sektor basis.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat mengembangkan dan memberikan prioritas bagi sektor-sektor yang menjadi unggulan dan memiliki spesialisasi regional seperti tersebut di atas sehingga dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2000), *Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka*,: BPS Kabupaten Sukoharjo dan BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo.
- _____, (1995), *PDRB Kabupaten Sukoharjo*, : BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo.
- _____, (2000), *PDRB Kabupaten Sukoharjo* : BPS Kabupaten Sukoharjo dan BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo.
- _____, (1995), *PDRB Propinsi Jawa Tengah* : BPS Propinsi Jawa Tengah.
- _____, (2000) *PDRB, Karesidenan Surakarta* : BPS Surakarta.
- Faried Wijaya, (1992), *Ekonomi Makro*, Edisi 3, Yogyakarta : BPFE–Yogyakarta.
- Hermanto, (2000), “Analisis Spesialisasi Regional Propinsi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.1.No.1, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Imamudin Yuliadi, (2001), “Aspek Ekonomi Kebijakan Otonomi Daerah”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.2 No.1 (Januari), Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kunarjo, (1993), *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi 2, Jakarta : Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press).
- Lincoln Arsyad, (1992), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 2, Jakarta : Bangian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- _____, (1993), *Pengantar Perencanaan Ekonomi*, Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- Prasetyo Soepono, (1993) “Analisis Shift-Share : Perkembangan dan Penerapan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 1 Tahun VIII, (September), Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- _____, (2001), “Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor) : Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 No. 1, (Januari), Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

- Suryana, (2000), *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Suyatno, (2000), "Analisis Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No.5/1999", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No. 2, (Desember), Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

TABEL 1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT
LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 1995 – 2000
(Dalam jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA (1)	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PERTANIAN	287.828,07	294.407,85	280.484,45	265.468,19	240.957,15	236.742,52
2. PERKEMBANGAN DAN PENGGALIAN	14.458,62	17.304,24	18.935,74	14.707,35	15.712,82	16.320,91
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	236.651,15	349.732,65	363.562,14	271.468,83	281.042,26	291.693,76
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	8.226,63	9.546,41	12.676,35	10.353,31	11.654,35	13.052,99
5. BANGUNAN	45.400,81	47.481,50	50.430,74	35.092,91	39.317,10	44.039,08
6. PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	187.952,69	223.024,19	240.125,47	241.968,50	252.446,70	270.015,09
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	30.442,55	33.300,05	37.072,94	34.339,42	38.181,19	40.172,31
8. KEUANGAN, SEWA, DAN JASA PERUSAHAAN	47.407,98	51.087,33	51.389,48	47.057,35	48.258,38	51.122,50
9. JASA-JASA	132.014,48	137.685,90	141.219,70	141.160,94	147.353,66	149.631,45
PDRB	990.382,98	1.163.570,12	1.195.897,01	1.061.616,80	1.074.923,61	1.112.790,61

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo.

TABEL 2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT
LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
SE-KAESIDENAN SURABAYA 1995 - 2000

LAPANGAN USAHA	TAHUN 1995	TAHUN 1996	TAHUN 1997	TAHUN 1998	TAHUN 1999	TAHUN 2000
1. Pertanian	261.634.382,75	275.585.452,6	276.846.061,34	282.599.233,08	287.977.428,47	301.850.528,37
2. Pertambangan dan Penggalian	5.437.081,96	6.136.593,2	6.405.756,68	5.452.539,83	5.999.816,58	5.914.654,41
3. Industri Pengolahan	194.073.258,78	208.744.985,33	214.696.390,8	169.740.991,34	168.698.753	158.748.009,39
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	5.404.556,27	5.733.835,4	5.726.163,07	5.296.285,93	6.164.400,07	7.777.914,7
5. Bangunan dan Konstruksi	21.068.668,19	23.556.886,44	22.929.447,32	20.757.512,4	21.098.118,85	23.163.044,42
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	241.064.677,68	255.151.277,26	260.390.693,22	237.307.515,23	238.415.847,97	237.897.942,36
7. Angkutan dan Komunikasi	29.147.279,77	32.368.461,38	36.355.444,92	42.989.281,18	42.925.268,19	47.103.361,18
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	47.083.430,45	48.439.169,04	49.505.831,55	44.169.678,63	45.571.213,33	49.879.500,71
9. Jasa - jasa	89.822.241,72	97.592.717,84	99.792.941,13	71.794.328,7	73.699.780,13	76.637.626,95
PDRB	894.735.577,57	953.309.378,49	972.648.730,03	880.107.356,32	890.532.626,59	908.972.582,49

Sumber : BPS Kodya Surabaya

TABEL 3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT
LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1995 – 2000

LAPANGAN USAHA	1995	1996	1997	1998	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	8211174,14	8487971,93	8216026,20	7940632,03	8184670,67	8447654,90
2. Pertambangan dan Penggalan	471646,19	527557,05	587426,67	545662,76	575612,99	589963,73
3. Industri Pengolahan	12260155,08	13327648,25	13709758,32	11707062,06	12036861,68	12421426,24
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	304154,62	346833,47	393556,61	407879,93	450221,11	493724,43
5. Bangunan dan Kontruksi	1808178,57	2011485,33	2139684,09	1452845,56	1626238,40	1650463,27
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8337892,12	9034329,60	9612930,14	8747296,31	9026900,22	9631793,24
7. Angkutan dan Komunikasi	1510647,54	1705241,76	1766846,11	1765265,71	1946926,99	2053018,42
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1974205,57	2114567,23	2283522,22	1502666,55	1559305,07	1605968,13
9. Jasa – jasa	4135898,81	4306569,10	4420088,54	3995962,44	3987776,61	4038526,07
PDRB	39013952,64	41862203,72	43129838,90	38065273,35	39394513,74	40932538,43

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah